

KEKERASAN VERBAL DALAM MIMBAR PEWARTAAN: SALAH SATU FAKTOR DETERMINAN PARTISIPASI UMAT KATOLIK DALAM HIDUP MENGGEREJA

Mario Gasperz*); Donatus Wea)**

*) Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke, Papua Selatan
Email: gaspermario96@gmail.com

**) Dosen STK Santo Yakobus Merauke, Papua Selatan
Email: romodonwea@stkyakobus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menemukan bukti bahwa kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan menjadi salah satu faktor determinan partisipasi umat katolik dalam hidup menggereja. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dibagikan kepada 10 informan yang adalah anggota paroki yang tersebar di lima paroki di kota Merauke dan di luar kota Merauke. Hasil pengolahan data, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa kekerasan verbal yang dilakukan oleh otoritas Gereja di mimbar pewartaan (ruang homili dan ruang pengumuman) menjadi salah satu faktor utama yang menentukan partisipasi umat katolik dalam berbagai aspek kehidupan menggereja. Kekerasan verbal di mimbar pewartaan berdampak secara psikologis, sosial, spiritual, kultural dan hidup berjemaat bagi umat yang menjadi korban. Dampak ini bermuara pada sikap dan keputusan yang diambil oleh para korban untuk hidup selanjutnya, yakni tidak terlibat dalam berbagai kegiatan Gereja, mengikuti perayaan liturgi hari minggu dan hari raya di paroki lain dan berpindah ke Gereja protestan atau denominasi Gereja lainnya serta menjadi penganutnya. Temuan ini menyadarkan setiap otoritas Gereja untuk menggunakan mimbar pewartaan sesuai dengan fungsinya dan menguasai kode etik (kesantunan) dalam berbahasa, khususnya di ruang publik.

Kata Kunci: Kekerasan Verbal, Mimbar Pewartaan, Partisipasi.

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu media komunikasi yang paling efektif dan sangat sering dipakai. Keefektifan bahasa sebagai media komunikasi diukur dari kepatuhan para pemakainya terhadap kaidah-kaidah berbahasa, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami. Salah satu kaidah yang perlu diperhatikan adalah kesantunan dalam berbahasa. Brown dan Levinson dalam Alabdali (2019) menegaskan bahwa kesantunan dalam bertutur atau berbahasa perlu diperhatikan oleh setiap pembicara agar isi pembicaraan tidak membangkitkan kekecewaan atau kemarahan pihak yang mendengar. Kesantunan menurut Lakoff dalam Syahrul (2008) adalah sistem hubungan interpersonal untuk mempermudah interaksi dengan meminimalisir potensi konflik dan konfrontasi. Frasser dalam Chaer (2012) mendeskripsikan kesantunan sebagai properti yang harus disepakati bahwa pembicara dan mitranya tidak melampaui hak-haknya dalam berbicara.

Kesantunan berbahasa perlu diterapkan di setiap ruang dan waktu, baik ketika menggunakan media online maupun offline. Menurut Agustina (2017) kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, secara khusus media sosial tidak mengeliminir atau menghapus kaidah kesantunan berbahasa bagi para pembicara, sebaliknya penggunaan media yang ada harus berpijak pada kaidah kesantunan berbahasa. Penelitian Suyanto

(2016) menyimpulkan bahwa kehadiran media sosial di satu sisi sungguh menawarkan berbagai kemudahan bagi para penggunanya untuk berbagi informasi secara cepat, mudah dan murah. Namun di sisi lain media sosial terkadang memberi ruang yang terlalu terbuka kepada para pemakai hingga keluar dari batas-batas peradaban. Salah satu wujudnya adalah media sosial dijadikan sebagai ajang untuk saling mempersalahkan, memprovokasi, menghina bahkan menjurus kepada dehumanisasi (Hendry, 2008, Yuliani, 2018).

Berdasarkan pengamatan peneliti, kesantunan dalam berbahasa secara offline terkadang kurang diperhatikan oleh para penutur, secara khusus ketika berhadapan dengan publik baik dalam konteks agama maupun politik. Dalam konteks agama, ada tokoh agama yang kurang bijaksana menggunakan diksi atau dengan sengaja mengumbar kata-kata yang bernada sindiran, menghakimi bahkan menyalahkan dalam mimbar pengajaran resmi sehingga ada penganut yang merasa tersinggung, tersakiti dan terluka. Jika cara ini diulang beberapa kali maka akan berdampak buruk terhadap mereka yang merasa tersakiti dan terluka serta memberi peluang terjadinya konflik. Dalam konteks politik juga tidak jauh berbeda; banyak tokoh politik yang dengan seenaknya menggunakan bahasa yang tidak santun baik terhadap tokoh politik yang lainnya (lawan politik) maupun terhadap masyarakat, yang berdampak pada terjadinya konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal.

Penggunaan bahasa yang tidak santun yang mengganggu ketenangan pendengar atau lawan bicara secara psikologis dikenal dengan kekerasan verbal (Amstrong dalam Eriyanti, 2018, Zikrillah, dkk. 2021). Menurut Keraf (1994), bahasa mempunyai peranan sentral dalam perkembangan sosial dan emosional, dan dikategorikan ke dalam dua bagian, yakni bahasa verbal (ucapan, simbol, kata-kata) dan non verbal (fisik). Selanjutnya Keraf menegaskan bahwa penggunaan bahasa sebagai sarana sentral dalam berkomunikasi harus memperhatikan tata sopan santun (Zikrillah, dkk, 2021).

Kekerasan verbal, sebagai dampak dari ketidakpahaman terhadap kaidah berbahasa, dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada kekerasan verbal yang dilakukan oleh otoritas Gereja katolik dalam mimbar pewartaan resmi. Mimbar pewartaan adalah media pewartaan sabda Allah, pewartaan iman dan moral yang merupakan bagian yang integral dari perayaan resmi Gereja katolik yang seyogyanya membawa kesejukan, kedamaian, kekuatan dan ketenangan batin. Mimbar pewartaan juga menjadi sarana bagi umat Allah untuk menambah wawasan tentang ajaran iman dan moralitas katolik yang secara tidak langsung membantu umat untuk bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Mimbar pewartaan juga menjadi sarana yang digunakan oleh otoritas Gereja untuk menggugah, menyadarkan, membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran umat secara khusus partisipasinya dalam hidup menggereja, sebagai salah satu buah dari berkembangnya iman mereka. Sayangnya, melalui mimbar pewartaan juga terjadi kekerasan verbal yang membawa dampak buruk (merugikan) umat beriman. Salah satu dampaknya adalah umat menjadi tersinggung, kecewa dan terluka. Rasa terluka pada akhirnya bermuara pada menarik diri dari aktivitas dan kehidupan bersama sebagai umat beriman jika tidak secepatnya dan secara arif diatasi. Rasa tersinggung dan tersakiti juga dapat menjadi

indikasi bahwa komunitas beriman sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Dampak yang paling serius dari rasa tersinggung dan terluka adalah sebagai bola panas yang menjadi pemicu bagi umat tertentu untuk berpindah keyakinan.

Realitas yang ada menjadi pratanda bahwa mimbar pewartaan mengalami degradasi peran, yakni penodaan terhadap hakikat perannya yang kudus, lantaran tidak lagi semata-mata sebagai sarana untukewartakan kebenaran dan kebaikan serta menghantar umat Allah kepada kedekatan dengan Allah dan mengalami keselamatan, tetapi juga memberi cela di mana sebagian umat Allah (walaupun bersifat kasuistik) menemukan peluang untuk memilih keputusan dan jalan yang menyesatkan, walaupun dengan keterpaksaan. Fakta-fakta ini mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam melalui beberapa rumusan permasalahan konsekwensi dari kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan. Pertama, model-model kekerasan verbal yang dilakukan oleh otoritas Gereja katolik di mimbar pewartaan. Kedua, apakah kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan menjadi salah satu faktor determinan partisipasi umat katolik, khususnya yang menjadi sasaran dari kekerasan verbal, dalam kehidupan menggereja. Ketiga, strategi-strategi apa yang dapat digunakan untuk membantu umat Allah yang menjadi sasaran dari kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Kekerasan Sosial

Sebelum mendeskripsikan kekerasan sosial, perlu dijelaskan secara garis besar hakikat dari kekerasan. Menurut Galtung dalam Basrowi dan Sukidin (2003), kekerasan adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang dalam proses mengaktualisasikan potensi diri secara wajar (Handry, 2008). Menurut Galtung hal yang menghalangi itu sebenarnya dapat dihindari. Dengan kata lain, Galtung mau menegaskan bahwa kekerasan hanya dapat teratasi jika faktor yang menjadi penghalang disingkirkan (Muchsin, 2006). Secara lebih gamblang Galtung menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain (Galtung, 1971). Selanjutnya Galtung mengkategorikan kekerasan ke dalam tiga tipe, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan budaya (Hendry, 2003). Ada juga pendapat lain yang melihat kekerasan dari sudut pandang sebagai pelanggaran norma atau hukum. Menurut Makarim (2014), kekerasan adalah perlakuan atau tindakan yang tidak menyenangkan, tidak manusiawi dan bertentangan dengan norma tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita,

Mengacu kepada pendapat Galtung (1971) dan para pakar lainnya, kekerasan verbal merupakan bagian dari kekerasan sosial. Menurut Santoso (2002), teori kekerasan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar (Syukron, 2017). Pertama, Teori kekerasan sebagai tindakan aktor secara individu maupun kelompok. Mengenai hal ini Santoso menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Kekerasan kelompok (kolektif) adalah kekerasan yang

dilakukan oleh beberapa orang dan juga dapat berwujud sebagaimana kekerasan individu. Kedua, teori kekerasan struktural yakni kekerasan yang terbentuk dalam suatu sistem sosial atau suatu struktur, seperti halnya aparaturnegara. Ketiga, teori kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktur. Para ahli teori ini berpendapat bahwa konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat (Bellah, 2000). Berdasarkan teori kekerasan sosial, kekerasan verbal merupakan perwujudan dari kekerasan aktor, baik secara individu maupun secara kelompok.

Menurut kajian Wahid Institute (2010) kekerasan sosial menjadi penyebab utama terjadinya konflik sosial. Ada tiga tahapan konflik, yakni *latent tension*, *nascent conflict* dan *intensified conflict* (Syukron, 2017). Pada tahapan *latent tension*, konflik masih dalam bentuk kesalahpahaman dan kedua belah pihak belum terlibat dalam konflik yang sesungguhnya. Pada tahapan *nascent conflict*, mulai nampak konflik dalam bentuk pertentangan tetapi belum disertai dengan ungkapan-ungkapan ideologis yang menantang pihak lawan. Pada tahapan *intensified conflict* mulai terjadi konflik terbuka yang disertai dengan radikalisasi gerakan antara kedua belah pihak. Kekerasan verbal merupakan bagian dari *latent tension*, karena para pihak tidak terlibat dalam konflik secara langsung, tetapi lebih kepada dampak psikologis.

Menurut Fauzi, dkk (2000) kekerasan sosial dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni pertama, kekerasan fisik seperti peledakan, bom bunuh diri dan aneka pola kekerasan fisik lainnya. Kedua, kekerasan psikologis, yakni bentuk kekerasan sosial berupa ancaman psikologis terhadap subjek tertentu dengan menggunakan berbagai media (Syukron, 2017). Ketiga, kekerasan ideologi yakni bentuk kekerasan yang mempengaruhi pemikiran atau pemahaman seseorang. Bentuk kekerasan ini lebih berbahaya dari bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan verbal merupakan bagian dari kekerasan psikologis.

2. Kekerasan Verbal

Brenan dalam Eriyanti (2018) menjelaskan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan dengan menggunakan bahasa (kata-kata, frase, metafora dengan maksud untuk mengabaikan, memermalukan, mengejek, merendahkan, mencelakakan, mengancam, mengerdilkan, menggosip, memaki, mengusir, menghasut dan meremehkan kemampuan lawan bicara, sehingga menyebabkan ketidaksukaan dan gangguan secara psikologis dalam berdialog. Pandangan Brenan ini sejalan dengan pandangan Baryadi (2012) yang mendeskripsikan kekerasan verbal sebagai kekerasan yang bermediakan bahasa yakni dengan menggunakan kata-kata, kalimat dan unsur-unsur bahasa lainnya. Kekerasan verbal juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang halus dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menghina (Chiriyah, 2018). Esensi dari kekerasan verbal adalah menggunakan lambang bahasa dan dilakukan secara lisan. Pandangan-pandangan yang ada menghantar kita untuk merumuskan konsep kekerasan verbal secara lebih sederhana dan komprehensif, yakni sebagai salah satu wujud kekerasan dengan menggunakan bahasa dan unsur-unsurnya, baik secara langsung maupun secara simbolik, dengan tujuan untuk memermalukan, mengejek, menghina,

dan meremehkan, dengan sasaran akhir untuk memancing mitra dialog (lawan bicara) atau mengalahkannya.

Kekerasan verbal terdiri atas beberapa kategori. Zikrillah, dkk (2021) mencoba menguraikan secara singkat beberapa kategori dari kekerasan verbal, yakni (a) *Withholding*, yakni pemutusan hubungan sebagai penolakan terhadap lawan bicara (tidak mendukung dengan menunjukkan sikap yang tidak berempati. (b) *Countering* atau sikap perlawanan di mana lawan bicara dilihat sebagai musuh. (c) *Discounting* yakni menyangkal kenyataan dan pengalaman yang terjadi. (d) *Verbal abuse disguised as jokes* yakni kekerasan verbal yang dilakukan dengan lelucon yang berisikan pemeremehan terhadap lawan bicara. (e) *Blocking and diverting*, yakni penolakan untuk berkomunikasi dengan mengalihkan topik pembicaraan atau dalam bentuk menahan informasi. (f) *Accusing and blaming*, yakni tindakan menuduh dan menyalahkan lawan bicara karena kemarahan, kejengkelan atau rasa tidak aman. (g) *Judging and criticizing*, yakni tindakan menilai dan mengkritik atau menghakimi lawan bicara. (h) *Trivializing*, yakni menyepelkan lawan bicara dan menganggap tidak penting apa yang dikatakannya dengan rentetan kata-kata. (i) *Undermining*, yakni merusak atau melemahkan lawan bicara dengan kata-kata yang mematikan. (j) *Threatening*, yakni mengancam lawan bicara sehingga menimbulkan ketakutan. (k) *Name calling*, yakni memberi pelecehan dengan panggilan nama atau julukan secara kasar, rasis dan merendahkan. (l) *Forgetting*, yakni tindakan sengaja melupakan dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi sesungguhnya tidak pernah terjadi. (m) *Ordering*, yakni memerintah sambil merendahkan pasangan bicara. (n) *Denial*, yakni menyangkal lawan bicara dengan tujuan untuk menurunkan kondisi mentalnya. (o) *Abusive anger*, yakni kemarahan secara kasar terhadap lawan bicara.

Kategori kekerasan verbal sebagaimana diuraikan di atas sering sekali dipraktekkan baik secara tunggal, yakni dengan menggunakan salah satu kategori maupun menggunakan beberapa kategori secara bersamaan. Misalnya kekerasan verbal dalam bentuk *verbal abuse disguised as jokes* dapat juga disertakan dengan *judging and criticizing*.

Kekerasan verbal juga dapat dibagi lagi ke dalam beberapa jenis selain berdasarkan kategori. Yuliani (2017) membagi kekerasan verbal ke dalam empat jenis, (a) Kekerasan verbal tidak langsung, yakni kekerasan verbal yang tidak langsung mengenai korban tetapi melalui media atau proses berantai. (b) Kekerasan verbal secara langsung, yakni langsung mengenai sasaran (korban) ketika berkomunikasi. (c) Kekerasan verbal represif, yakni menekan atau mengintimidasi korban. (d) Kekerasan verbal aleniatif, yakni menjauhkan, mengasingkan atau bahkan melenyapkan korban dari komunitas atau masyarakat.

Kekerasan verbal juga dapat dibagi berdasarkan bentuk. Menurut Yuliani (2017), ada beberapa bentuk kekerasan verbal yang lazim dilakukan selama ini, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan bentuk-bentuk lainnya. Dari bentuk-bentuk kekerasan verbal yang cukup dominan dilakukan adalah pencemaran nama baik dan memprovokasi.

Ada banyak penelitian yang membahas kekerasan verbal dan dampaknya bagi yang menerima. Kebanyakan kekerasan verbal yang disoroti adalah kekerasan verbal lewat media sosial (Zein dan Wagiaty, 2021). Penelitian Utoro, dkk (2020) perihal kekerasan sosial dalam media sosial facebook menemukan bahwa banyak pemakai yang menggunakan facebook sebagai media umpatan, hiperbola, stigmatisasi dan asosiasi pada binatang. Penelitian Suciartini dan Sumartini (2018) menemukan bahwa media sosial menjadi sarana terjadinya *verbal bullying*. Ahdiyati (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa kekerasan verbal juga terjadi melalui konten youtube dan hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku verbal pemakai konten.

3. Kekerasan Verbal dalam mimbar pewartaan

Kekerasan verbal tidak hanya dilakukan di tempat publik berhadapan dengan masyarakat luas, tetapi juga sudah mulai merebak sampai ke rumah-rumah ibadah dengang lingkup audiens yang terbatas (para penganut agama), bahkan dalam upacara resmi keagamaan. Di dalam ruang keagamaan, kekerasan verbal tidak hanya ditujukan untuk penganut agama lain (dalam bentuk merendahkan, menghina, dan memprovokasi) tetapi juga ditujukan untuk penganut agama sendiri yang menjadi bagian dari perayaan resmi suatu agama. Merebaknya kekerasan sosial secara verbal dalam ruang peribadatan dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah ketidakpahaman otoritas agama sebagai pemimpin atau pembicara akan kaidah-kaidah berbahasa.

Mimbar pewartaan dalam agama katolik adalah tempat untuk mewartakan sabda Allah yang berdampak pada kesadaran umat untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, serta keutamaan-keutamaan (moralitas kristiani) lainnya. Berpijak pada peran mulia mimbar pewartaan, kita dapat mengatakan bahwa dari mimbar pewartaan umat Allah mendapatkan sapaan dan ajaran yang menyejukkan, menghibur, memberi kekuatan, menyemangati, menggugah, mendamaikan dan memotivasi untuk memperbaharui hidup secara terus menerus. Dari mimbar pewartaan umat Allah dihimbau dan didorong untuk selalu aktif dalam kehidupan menggereja. Dari mimbar pewartaan umat Allah mendapat petunjuk arah untuk hidup lebih baik sebagai murid-murid Yesus.

Dalam kenyataan, peran mulia mimbar pewartaan mengalami pergeseran lantaran kekurangpiawaian bahkan ketidakpahaman otoritas Gereja sebagai pengguna utama, sebagai media pewartaan sabda Tuhan. Dari mimbar pewartaan justru terucap kekerasan verbal, dengan pelaku utama adalah otoritas Gereja. Kekerasan verbal yang ada membawa dampak buruk terhadap umat Allah yang merasa bahwa dirinyalah yang menjadi sasaran, sehingga terpuuklah rasa kecewa, tersinggung, marah dan terluka. Jika otoritas Gereja tidak segera menyadari kekeliruan yang dibuatnya dan mencari solusi maka akan terjadi hal-hal buruk dalam diri umat Allah yang menjadi korban kekerasan verbal tersebut.

Secara umum kekerasan verbal di mimbar pewartaan dapat berupa sindiran, fitnahan, menakut-nakuti, mengancam, stigmatisasi, eufimisme dan disfemisme (Choiriyah, 2018). Bentuk-bentuk kekerasan verbal ini menimbulkan gangguan secara psikologis pada si penderita.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti mau mengeksplorasi keterlibatan dan respons para informan yang selama ini menjadi objek penderita (sasaran kekerasan verbal). Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang tersebar di beberapa paroki sekitar kota Merauke dan pinggiran kota. Setiap paroki diambil dua orang sebagai informan dengan kategori tidak berpartisipasi dalam kehidupan menggereja dan menjadi sasaran kekerasan verbal. Adapun paroki-paroki yang menjadi asal informan adalah paroki katedral (2 informan), paroki Santo Joseph Bampel (2 orang), paroki Mopah Lama (2 orang), Paroki Bunda Hati Kudus Kuper (2 orang) dan paroki Santo Petrus Erom (2 orang). Adapun teknik dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana (2014) dipilih untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara; yang mencakup tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang ada selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan Gereja katolik menjadi salah satu faktor determinan yang amat berpengaruh terhadap partisipasi umat beriman (sebagai sasaran atau yang mengalami kekerasan verbal) dalam hidup menggereja. Fenomena ini sekaligus sebagai salah satu bentuk penyelewengan terhadap keluhuran fungsi mimbar pewartaan; sebagai media untuk menebarkan kasih, kedamaian, kesejahteraan, sukacita, penghiburan dan penguatan, yang sekaligus menyadarkan dan membangkitkan semangat umat untuk lebih terlibat dalam berbagai tugas perutusan Gereja yang mencakup *koinonia*, *leiturgia*, *diakonia*, *kerygma* dan *martyria*. Realitas yang cukup mengkhawatirkan ini, meskipun bersifat kasuistik, harus segera diatasi demi pemulihan *communio* umat Allah dalam sebuah paroki di bawah kepemimpinan seorang pastor paroki (bdk Kanon 515 Kitab Hukum Kanonik 1983). Setiap pastor paroki, sebagai otoritas Gereja tertinggi di parokinya, harus menghadirkan diri sebagai gembala yang baik, yang menunaikan pastoral kerahiman sebagai perpanjangan kasih Kristus yang paripurna kepada umat yang digembalainya (bdk Yoh. 10: 1-15 tentang Gembala yang baik).

Untuk dapat membuktikan secara akurat bahwa kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan menjadi salah satu faktor penentu keterlibatan umat Allah dalam hidup menggereja, dapat kita simak dari deskripsi dan pembahasan hasil penelitian berikut ini. Hasil penelitian ini dipilah berdasarkan rumusan masalah yang selanjutnya dibagi berdasarkan unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan masalah yang didalami. Ada tiga kajian utama yang sekaligus menjawab tiga rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Model-model kekerasan verbal yang dilakukan oleh otoritas Gereja katolik di mimbar pewartaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada lima model kekerasan verbal yang cukup dominan dan frekwentatif digunakan oleh otoritas Gereja di mimbar pewartaan yang dialami oleh para informan. Kelima model kekerasan verbal tersebut antara lain: (1) Mengumbar kemarahan dengan menggunakan kata-kata yang tidak santun, (2) Menyindir, (3) Menyinggung dengan menggunakan sosok umat atau kelompok umat yang dituju sebagai contoh, (4) Mengancam (lebih pada ancaman secara liturgis), dan (5) Memprovokasi. Dari kelima model kekerasan verbal ini, yang prosentasenya cukup tinggi lantaran kerap dialami dan diterima oleh umat Allah dari otoritas Gereja adalah mengumbar kemarahan dengan menggunakan kata-kata yang tidak santun dan memberi ancaman secara liturgis. Model kekerasan verbal yang secara kuantitatif menempati posisi kedua adalah menyinggung dengan menggunakan sosok umat atau kelompok umat yang dituju sebagai contoh. Kedua model yang lain yakni menyindir dan memprovokasi menempati posisi ketiga.

Ada dua momentum yang digunakan oleh otoritas Gereja dalam mengekspresikan kekerasan verbal terhadap umat lewat mimbar pewartaan, yakni ketika memberikan homili dan saat memberikan pengumuman. Prosentase untuk kedua momentum ini berada pada titik yang seimbang. Kelima model kekerasan verbal dilakukan oleh otoritas Gereja ketika memimpin liturgi ekaristi, baik dalam ruang homili (pewartaan suci) maupun dalam ruang pengumuman (menyampaikan beberapa informasi penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh umat Allah yang mengikuti perayaan liturgi).

Fenomena yang ada menjadi bukti nyata bahwa *pertama*, otoritas Gereja tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan kesadaran perihal kesantunan berbahasa. Seluruh apapun maksud dan pesan yang mau disampaikan oleh seseorang jika tidak menggunakan bahasa secara tepat dan santun sebagai medianya, hasilnya akan melenceng dari tujuannya (berlawanan dengan apa yang diharapkan). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Brown dan Levinson dalam Alabdali (2019), bahwa kesantunan dalam berbahasa perlu diperhatikan oleh setiap pembicara agar isi pembicaraan tidak membangkitkan kekecewaan atau kemarahan pihak yang mendengar. Kekerasan verbal yang dilakukan dalam mimbar pewartaan oleh otoritas Gereja khususnya dalam bentuk mengumbar kemarahan dengan bahasa yang tidak santun atau menjadikan umat secara individual maupun kelompok sebagai contoh dengan maksud mengorbitkan kesalahannya, entah dalam ruang homili maupun dalam ruang pengumuman, menjadi wujud nyata rendahnya ketrampilan otoritas Gereja untuk menguasai dan mengimplementasikan seni berbahasa yang sesungguhnya (sesuai dengan ruang dan waktu).

Cara berbahasa yang mengabaikan kode etik berkomunikasi, apalagi di ruang publik (mimbar pewartaan) dapat membangkitkan kekecewaan, ketidaknyamanan, menimbulkan luka di hati umat, mengumbar kemarahan bahkan kebencian dalam diri umat terhadap pelakunya. Kekerasan verbal seperti ini akan membawa dampak yang lebih lanjut dan luas terhadap umat sebagai korbannya. Untuk itu, kode etik berbahasa (kesantunan berbahasa) perlu dipahami dengan baik oleh siapapun sebelum berkomunikasi dengan lawan bicara. Mengenai hal ini Keraf (1994) menegaskan bahwa

penggunaan bahasa sebagai sarana sentral dalam berkomunikasi harus memperhatikan tata sopan santun (Zikrillah, dkk, 2021).

Kedua, rendahnya pemahaman otoritas Gereja perihal hakikat nan luhur dari mimbar pewartaan. Mimbar pewartaan dalam Gereja katolik adalah tempat untuk mewartakan sabda suci yang posisinya berada di samping altar utama yang menjadi pusat perayaan ekaristi. Pedoman Misale Romawi (PUMR) menegaskan bahwa mimbar adalah tempat untuk membawakan bacaan-bacaan, mazmur tanggapan, homili dan pujian paskah. Hanya pelayan sabda (orang yang telah dipersiapkan serta memiliki kewenangan karena martabat sakramental boleh membawakannya. Mimbar sabda hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga pembaca dan pewarta dapat dilihat dan didengar dengan mudah oleh umat beriman yang hadir dalam perayaan liturgi (PUMR art. 309). Lebih lanjut PUMR menjelaskan bahwa keagungan sabda Allah perlu dipahami dengan baik oleh para pelayan dan umat beriman. Dalam bagian liturgi sabda, mimbar pewartaan menjadi pusat pewartaan sekaligus pusat perhatian umat.

Ketika mimbar pewartaan disalahgunakan oleh pelayan sabda, bukannya untuk mewartakan khabar sukacita melainkan mengumbar kemarahan kepada umat (entah umat secara keseluruhan maupun oknum atau kelompok umat tertentu – dengan alasan apapun) maka keluhuran mimbar tersebut menjadi tercemar. Pada konteks ini, mimbar pewartaan menjadi media terjadinya kekerasan secara verbal oleh otoritas Gereja dengan objeknya adalah umat Allah yang sedang hadir dalam perayaan itu. Hal inilah yang dialami oleh beberapa umat di beberapa gereja paroki di kota Merauke dan pinggiran kota. Salah satu alasan terjadinya penyalahgunaan mimbar pewartaan adalah rendahnya pemahaman otoritas Gereja (pelayan suci khususnya kaum terahbis) akan hakikat dari mimbar sabda. Realitas ini mendukung hasil penelitian Choiriyah (2018) bahwa kekerasan verbal yang terjadi di mimbar pewartaan secara umum berupa sindiran, fitnahan, menakut-nakuti mengancam, stigmatisasi, eufimisme dan disfemisme.

Ketiga, kemampuan untuk menguasai diri masih rendah. Mengumbar kemarahan di depan publik dengan menggunakan bahasa yang tidak santun menjadi salah satu indikator untuk mengukur kematangan seseorang secara emosional. Penyelewengan penggunaan mimbar pewartaan sebagai media untuk mengekspresikan kekerasan verbal oleh otoritas Gereja adalah juga pratanda bahwa otoritas Gereja belum memiliki kematangan secara emosional. Kenyataan ini mendukung pandangan Keraf (1994) bahwa bahasa mempunyai peranan sentral dalam perkembangan sosial dan emosional, dan dikategorikan ke dalam dua bagian yakni bahasa verbal dan non verbal.

2. Dampak kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan terhadap partisipasi umat dalam hidup menggereja

(a) Reaksi dan tanggapan dari umat yang menjadi sasaran kekerasan verbal

Hasil penelitian mengangkat empat reaksi sekaligus sebagai tanggapan yang diberikan oleh umat Allah yang menjadi sasaran kekerasan verbal oleh otoritas Gereja di mimbar pewartaan, yakni marah, tersinggung, tidak nyaman selama beberapa waktu, dan menarik diri dari kebersamaan dengan umat beriman lainnya dalam perayaan liturgi di gereja. Kebanyakan korban kekerasan verbal menunjukkan reaksi dengan menarik diri dari kebersamaan dengan kelompok umat. Yang lainnya memendam kemarahan yang

berkepanjangan terhadap otoritas Gereja sebagai pelaku kekerasan verbal. Sebagian menunjukkan reaksi berupa berupa perasaan tersinggung dan mengalami ketidaknyaman di dalam batin.

Alasan utama terjadinya reaksi umat berupa menarik diri dari kebersamaan dengan kelompok umat yang lainnya dalam perayaan liturgi adalah karena otoritas Gereja menjadikan kesalahan oknum umat maupun kelompok umat sebagai contoh yang tidak baik dan tidak patut ditiru oleh umat yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh otoritas Gereja ini sesungguhnya melecehkan harga diri umat kegembalaannya dan secara tidak langsung menciptakan perpecahan di dalam persekutuan umat. Perasaan terluka dan tersakiti memberi peluang kepada mereka untuk menghindari dari kebersamaan dalam perayaan. Perasaan terluka yang diderita oleh umat sebagai korban kekerasan verbal jika tidak segera diatasi akan berkembang menjadi kebencian dan dendam. Hal ini bertentangan dengan doa Yesus bagi murid-muridNya agar mereka selalu bersatu dalam seluruh tugas pelayanan dan perutusan di dunia ini (bdk. Yoh. 17: 1-26).

Reaksi berupa memendam kemarahan yang berkepanjangan terhadap kekerasan verbal oleh otoritas Gereja pada akhirnya bermuara pada tidak mengambil bagian dalam kebersamaan dengan anggota umat yang lainnya dalam perayaan liturgi di gereja. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan berpengaruh langsung dan kuat terhadap kehadiran dan kebersamaan umat khususnya dalam perayaan liturgi.

(b) Dampak kekerasan verbal terhadap korban

Hasil penelitian membuktikan bahwa ada 5 dampak yang cukup dominan dari kekerasan verbal di mimbar pewartaan oleh otoritas Gereja, yang dialami oleh para korban. Kelima dampak itu adalah (1) dampak psikologis, (2) dampak sosial, (3) dampak spiritual, (4) dampak kultural, (5) dampak hidup berjemaat yang mencakup panca tugas Gereja (*leiturgia, koinonia, diakonia, kerygma dan martyria*).

Dampak psikologis dirasakan oleh korban dalam bentuk merasa dipermalukan, tersakiti, gelisah dan kecewa. Perasaan-perasaan ini akan mengganggu aktivitas rutin harian korban. Dampak ini sesungguhnya sejalan dengan temuan Nafisah, dkk (2021), bahwa *verbal abuse* akan membawa akibat yang buruk secara psikologis terhadap korban yakni korban akan merasa tersakiti, dipermalukan dan dihina. Penelitian Syukron (2017) juga menekankan dampak psikologis dari kekerasan verbal. Hal yang sama juga ditemukan oleh Choiriyah (2018) dalam penelitiannya. Para informan yang menjadi korban dari kekerasan verbal otoritas Gereja di mimbar pewartaan semuanya mengalami tekanan secara psikologis.

Kekerasan verbal dalam ruang pewartaan oleh otoritas Gereja juga membawa dampak sosial, yakni korban menarik diri dari pergaulan dengan anggota umat Allah yang lain dan akan menutup diri. Kesaksian dari para informan menunjukkan bahwa kondisi ini pada umumnya dipicu oleh rasa malu, terhakimi, tertuduh, kecewa dan marah, entah terhadap otoritas Gereja sebagai pelaku kekerasan verbal maupun terhadap sesama umat lain dan diri sendiri. Dampak spiritual dialami dalam bentuk ketidakterlibatan korban dalam berbagai perayaan iman yang menjadi salah satu unsur pemenuh kebutuhan spiritualnya. Sosok otoritas Gereja sebagai pelayan spiritual yang tugas utamanya adalah

melayani kebutuhan spiritual umat dilihat sebagai sosok yang memicu kesakitan dalam batin, kejengkelan dan kekecewaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Galtung (1971) bahwa kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal dan spiritual yang melemahkan, mendominasi dan menghancurkan orang lain sebagai objek dan juga pelakunya (Muchsin, 2006). Perasaan ini menjadi alasan bagi korban untuk tidak memberi ruang untuk keterlibatan otoritas Gereja dalam pelayanan rohani walaupun secara pribadi para korban membutuhkannya.

Secara kultural kekerasan verbal di mimbar pewartaan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Konflik bisa saja terjadi secara vertikal (antara umat yang menjadi korban kekerasan verbal dengan otoritas Gereja) maupun horizontal antarumat lantaran ada sebagian umat yang terprovokasi oleh apa yang disampaikan oleh otoritas Gereja di mimbar pewartaan dan dalam konteks tertentu mendukung atau membenarkan.

Dampak yang lebih luas dan membawa kerugian secara iman yang cukup besar kepada korban adalah tidak mengambil bagian dalam panca tugas Gereja, yakni *leiturgia* (keterlibatan dalam liturgi–menguduskan), *koinonia* (persekutuan), *diakonia* (pelayanan dalam kebersamaan), *kerygma* (pewartaan) dan *martyria* (memberi kesaksian berkat sakramen baptis dan krisma yang telah diterimanya). Rasa kecewa dan tersakiti membuat para korban memilih dan memutuskan secara sepihak untuk membatasi diri dalam berbagai kegiatan Gereja.

(c) Sikap dan keputusan yang diambil oleh para korban kekerasan verbal di mimbar pewartaan untuk hidup selanjutnya sebagai umat Allah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga sikap dan keputusan yang diambil oleh umat Allah (secara individu) sebagai tanggapan final terhadap kekerasan verbal yang dilakukan oleh otoritas Gereja dalam mimbar pewartaan. Ketiga sikap dan keputusan itu diurutkan mulai dari yang bersifat biasa sampai pada yang paling ekstrim. Adapun ketiga sikap sekaligus keputusan itu antara lain (1) tidak terlibat dalam berbagai kegiatan Gereja mulai dari tingkat komunitas basis sampai pada tingkat paroki. (2) Mengikuti perayaan liturgy khususnya ekaristi hari minggu dan hari raya di paroki lain. (3) Pindah ke Gereja protestan sebagai sebuah aksi protes dan ungkapan sakit hati.

Kekerasan verbal menjadi pemicu yang memberi ruang yang amat lebar kepada para korban untuk menarik diri dari persekutuan umat (sebagai anggota paroki). Aksi penarikan diri membawa dampak selanjutnya yakni tidak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Gereja. Rasa terluka dan tersakiti membuat umat yang menjadi korban kekerasan verbal menutup diri terhadap berbagai bentuk pelayanan oleh otoritas Gereja dan membatasi ruang gerakannya sebagai warga paroki, walaupun mereka sendiri dari sanubari yang terdalam sesungguhnya membutuhkannya.

3. Solusi untuk membantu korban kekerasan verbal melalui mimbar pewartaan

Hasil penelitian mengangkat dua strategi sebagai solusi yang menjadi harapan informan yang pernah bahkan saat ini masih menjadi korban kekerasan verbal di mimbar pewartaan. Kedua strategi itu adalah (a) Strategi kuratif dengan pendekatan humanis, spiritual dan psikologis, dan (b) Strategi preventif berupa forum dialog. Dalam strategi kuratif, yang menjadi pelaku utama adalah otoritas Gereja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan verbal di mimbar pewartaan, didukung oleh tokoh-tokoh umat

sebagai mediator. Pendekatan humanis (dari hati ke hati berdasarkan kesamaan martabat sebagai manusia) perlu dilakukan. Dalam pendekatan spiritual otoritas Gereja perlu dengan penuh kerendahan hati mengangkat kembali jiwa si korban yang terjerebab lantaran dibebani oleh rasa kesal dan bersalah, dengan berpola pada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati (bdk. Luk. 10: 25-37). Pendekatan spiritual dapat diakhiri dengan pelayanan sakramen rekonsiliasi oleh otoritas Gereja sembari otoritas Gereja juga mengintrospeksi dan membangun komitmen baru untuk pelayanan kasih selanjutnya. Pendekatan psikologis dilakukan dengan cara mengobati kekesalan, kekecewaan dan kesakitan yang diderita oleh korban. Dengan sentuhan seperti ini, umat Allah yang menjadi korban kekerasan verbal merasa disentuh, disapa dan dirangkul kembali sebagai bagian dari komunitas beriman.

Strategi preventif dijalani dengan membangun forum dialog antara umat dan otoritas Gereja. Dalam forum dialog itu otoritas Gereja akan mendapat banyak masukan dari tokoh-tokoh umat perihal kekhasan karakter umat yang menjadi domba gembalaannya dan harapan umat dari otoritas Gereja sebagai gembala mereka. Forum dialog yang difungsikan secara efektif akan menjadi salah satu aspek yang mengontrol dan menyadarkan otoritas Gereja (khususnya pastor paroki) untuk sungguh-sungguh menggunakan mimbar pewartaan sebagai media pewartaan kasih dan bukan sebaliknya; sebagai sarana terjadinya kekerasan verbal dengan objeknya adalah umatnya sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa apa yang dirumuskan sebagai pokok permasalahan terjawab, yakni bahwa kekerasan verbal di mimbar pewartaan oleh otoritas Gereja menjadi salah satu faktor determinan bagi partisipasi umat dalam hidup menggereja. Rasa tersakiti, terluka, malu, terhakimi, kecewa dan tidak puas yang dialami oleh umat sebagai korban dari kekerasan verbal yang dilakukan dalam mimbar pewartaan, entah dalam ruang homili maupun dalam ruang pengumuman, menjadi faktor pemicu yang amat kuat yang mendorong para korban untuk mengambil sikap dan keputusan selanjutnya.

Ada tiga sikap sekaligus keputusan, dalam temuan ini, yang kalau ditinjau dari sudut persekutuan sebagai umat Allah (*communio*) cukup fatal, yakni tidak terlibat dalam berbagai kegiatan Gereja di tingkat paroki, mengikuti perayaan liturgi khususnya liturgi ekaristi hari minggu dan hari raya di paroki lain dan pindah ke Gereja protestan. Sikap dan keputusan ini, sebagai dampak langsung dari kekerasan verbal oleh otoritas Gereja di mimbar pewartaan, menutup ruang, peluang dan kemungkinan bagi umat yang menjadi sasaran kekerasan verbal, untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Gereja, khususnya yang berkaitan dengan panca tugas Gereja yang harus diembannya sebagai konsekwensi atas martabat sakramen baptis yang telah diterimanya (*leiturgia, koinonia, diakonia, kerygma* dan *martyria*). Realitas ini menjadi indikasi yang sangat serius untuk dipahami dengan baik oleh otoritas Gereja agar sungguh-sungguh menggunakan mimbar pewartaan sesuai dengan fungsi dan hakikatnya. Di sisi lain, umat Allah sesungguhnya haus dan membutuhkan sapaan yang menyejukkan, menggugah, menguatkan,

memotivasi dan membangkitkan semangat sehingga secara iman mereka dimampukan untuk menghadapi persoalan hidup yang semakin hari kian kompleks. Mimbar pewartaan menjadi salah satu media sekaligus solusi untuk menjawab kehausan dan kebutuhan umat.

Peneliti menyadari bahwa cakupan penelitian ini terlalu sempit karena hanya berfokus pada kekerasan verbal. Peneliti menganjurkan agar penelitian selanjutnya mengkaji juga kekerasan struktural di mimbar pewartaan, karena peranan otoritas Gereja sangat berkaitan erat dengan kewenangan dan struktur yang dimilikinya.

Referensi

- Agustina, 2017. Kekerasan Verbal dalam Pilkada DKI: Mengungkap tingkat kesantunan masyarakat berwacana politik. *Prosiding Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Gamitan Masyarakat Multikultural*, Padang: Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Padang.
- Ahdiyat, M.A. 2020. Kekerasan Verbal di konten Youtube Indonesia dalam Perspektif Kultivasi. *Ettisal: Journal of Communication*, 5(2).
- Alabdali, T.S. 2019. Revisiting Brown and Levinson's Politeness Theory: A Middle-Eastern Perspective. *Bulletin of Advanced English Studies*, 2(2).
- Baryadi, I.P. 2012. *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Basrowi dan Sukidin, 2003. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Bellah, R.N. 2000. *Beyond Belief: Esei-esai tentang agama di dunia modern*, Jakarta: Paramadina.
- Chaer, A. 2010. *Kesantunan Berbahasa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A. 2012. *Linguistik Umum*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Choiriyah, Z. 2018. *Kekerasan verbal dalam pidato Aman Abdurahman*, Semarang: UIN Walisongo.
- Erlyanti, L.D. 2017. Pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan dalam perspektif feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, April – September 2017.
- Fauzi, I.A, dkk. 2009. *Laporan penelitian pola-pola konflik keagamaan di Indonesia (1990 – 2008)*, Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) dan Yogyakarta: The Asia Foundation (TAF).
- Galtung, J. 1971. A structural theory of imperialism. *Journal of Peace Research*, Vol.8, No.2,
- Hendry, E. 2003. *Monopoli tafsir kebenaran, wacana keagamaan kritis dan kekerasan kemanusiaan*, Pontianak: Kalimantan Persada Press.
- Hendry, E. 2008. Kekerasan dalam Pendidikan. *Jurnal AT-TURATS*, Vol. 3, No.1, Desember 2008.

- Karimkhanlooei, G. dan Vaezi, N. 2017. Politeness Strategies in Written Communication: The Issue of Iranian EFL Learners. *Journal of Language and Cultural Education*, 5(3).
- Komisi Liturgi KWI, 2013. *Pedoman Umum Misale Romawi (PUMR)*, Ende: Nusa Indah.
- Makarim, M. 2014. *Memaknai Kekerasan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM.
- Nafisah, M. dkk. 2021. Dampak dari Verbal Abuse terhadap keadaan psikologis seseorang. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 1.
- Riyanto, 2011. *Analisis Isi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Santoso, T. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suciartini, N.N.A dan Sumartini, N.L.P.U. 2018. Verbal Bullyng dalam media sosial ditinjau dari perspektif penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa. *Widyadari Jurnal Pendidikan*, 19(2).
- Suyanto, B. 2016. *Media Sosial di era masyarakat digital*, Jakarta: Media Indonesia.
- Syahrul, R. 2008. *Pragmatik kesantunan berbahasa menyibak fenomena bahasa Indonesia guru dan siswa*, Padang: UNP Press.
- Syukron, B. 2017. Agama Dalam Pusaran Konflik (studi analisis resolusi terhadap munculnya kekerasan social berbasis agama di Indonesia). *Jurnal RI'AYAH*, Vol. 02, No. 1, Januari – Juni 2017.
- Tim Penyusun Wahid Institute, 2010. *Laporan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan toleransi*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Utoro, D.Y.S, dkk. 2020. Kekerasan Verbal dalam media social Facebook. *Silampari Bisa: Jurnal penelitian pendidikan bahasa Indonesia, daerah dan asing*, 3(2).
- Yuliani, S. 2019, *Tindak tutur kekerasan verbal dalam pidato Habib Rizieq*, Yogyakarta: Universitas Yogyakarta Press.
- Zein D, dan Wagiaty, 2021. Kekerasan verbal dalam merespon status dan komentar politik di media social dan implikasinya terhadap kesantunan berbahasa. *Jurnal Suar Be'tang*, Vol. 16, No. 1, Juni 2021.
- Zikrillah, A. dkk. 2021. Perspektif Komunikasi Islam terhadap perilaku kekerasan verbal dalam permainan daring (studi kasus Game Mobile Legend: Bang Bang). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1.